

LKjIP 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



**DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG**

Jl. Slamet Riyadi 4B Gayamsari, Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan perkenanya maka penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2018 dapat terselesaikan sesuai rencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP Dinas Pertanian Kota Semarang disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2018.

Selain itu LKjIP Dinas Pertanian Kota Semarang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2018 serta Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada LKjIP dijelaskan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2018. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini secara garis besar berisi tentang Pendahuluan, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, dan Penutup. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian selama tahun 2018 telah terealisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat telah terwujudnya semua kegiatan-kegiatan baik di sektor pertanian pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan dan kehutanan, subsektor peternakan serta sektor pengembangan sumber daya.

Laporan kinerja ini disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber dana.

Dokumen LKjIP Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Demikian LkjiP Tahun 2018 ini disusun, dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi positif dalam penyelesaian LKjIP Tahun 2018 serta semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.

Semarang, Februari 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Permasalahan Utama	16
D. Sistematika Penulisan LKJIP.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Perubahan Rencana Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama Dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
C. Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi kepegawaian berdasarkan eselon jabatan	9
Tabel 1.2	Kondisi eselon Dinas Pertanian Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin	10
Tabel 1.3	Data Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Semarang	12
Tabel 1.4	Jumlah tanaman hortikultura yang ada di kebun wilayah kerja Balai Benih Pertanian	13
Tabel 1.5	Lokasi, luas lahan dan komoditas pada kebun Dinas Pertanian Kota Semarang.....	13
Tabel 2.1	Matrik, tujuan, sasaran, beserta indikator dan target kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2016 – 2021	20
Tabel 2.2	Penetapan capaian kinerja utama (IKU) tahun 2018 sesuai P-Renstra	24
Tabel 2.3	Indikator Program Kerja Tahun 2018	24
Tabel 3.1	Skala ordinal pengukuran kinerja	27
Tabel 3.2	Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama	28
Tabel 3.3	Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018	28
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	32
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	33
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Laporan Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Program Pada Kebijakan Mengembangkan Diversifikasi Usaha Pertanian Dan Pemasaran	34
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Program Pada Kebijakan Optimalisasi Teknologi Dan Sumberdaya Pertanian	35
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Program Pada Kebijakan Meningkatkan Pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular strategis	39
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Program Pada Kebijakan Penguatan Kelembagaan Petani	40
Tabel 3.11	Target Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dan 2017	40
Tabel 3.12	Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2018 dan 2017	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Komposisi pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang berdasarkan Jenis kelamin	10
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang berdasarkan tingkat pendidikan	11

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi	7
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 didasari oleh tekad dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan Walikota Semarang sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Semarang serta sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik/good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pertanian bagi Walikota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

LKjIP ini adalah alat akuntabilitas dan sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan demikian SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018, mengacu kepada Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang 2016 - 2021, yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Semarang yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Semarang Tahun 2018.

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LKjIP ini mengungkapkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Dinas Pertanian memiliki kedudukan dengan

rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
 - b. Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Sedangkan Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

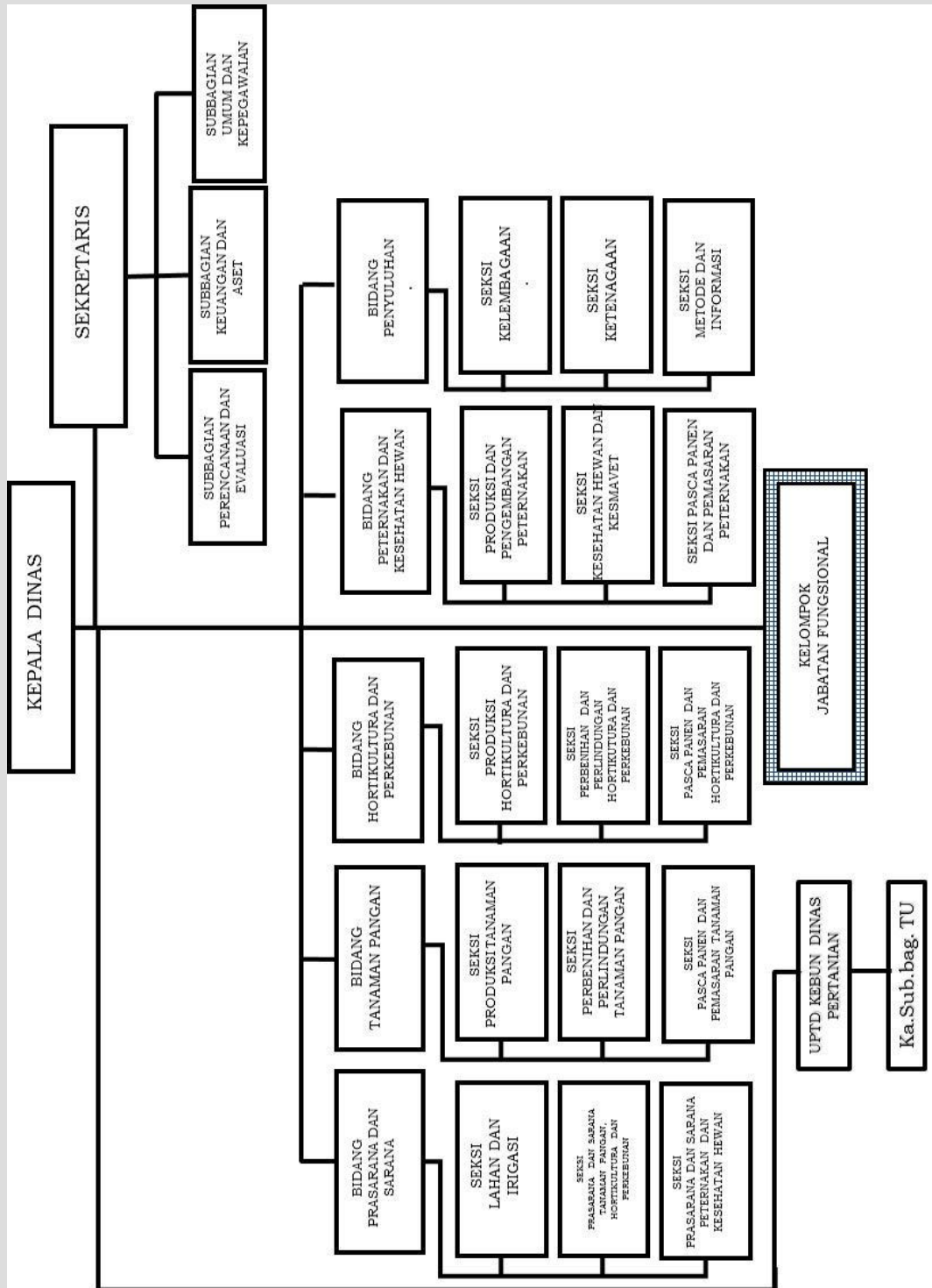
Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.
- b. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi lahan dan irigasi, seksi prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, dan seksi prasarana peternakan dan kesehatan hewan. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi tanaman pangan, seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, dan seksi pascapanen dan pemasaran tanaman pangan. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:

- 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi hortikultura dan perkebunan, seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura dan perkebunan, dan seksi pascapanen dan pemasaran hortikultura dan perkebunan. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
- 1) Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan;
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi dan pengembangan peternakan, seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan seksi pascapanen dan pemasaran peternakan. Bidang peternakan dan Kesehatan hewan terdiri dari:
- 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Peternakan.
- g. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi kelembagaan, seksi ketenagaan, dan seksi metode dan informasi. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Ketenagaan; dan
 - 3) Seksi Metode dan Informasi.
- h. UPTD Kebun Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang , jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang. Untuk bagan struktur organisasi dapat dilihat pada bagan 1.

Bagan 1. Struktur Organisasi



3. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis dalam menentukan arah tujuan kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang per akhir Desember 2018 sejumlah 78 orang ASN dengan perincian sebagai berikut:

Rincian pegawai menurut :

1. Golongan :

- a. Golongan I : - orang
- b. Golongan II : 6 orang
- c. Golongan III : 63 orang
- d. Golongan IV : 9 orang

2. Jabatan Struktural :

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III : 6 orang
- c. Eselon IV : 20 orang
- d. Non Eselon

1) Jabatan Fungsional Tertentu

- ❖ Penyuluh Pertanian Lapangan : 19 orang
- ❖ Medik Veteriner : 1 orang

2) Jabatan Fungsional Umum : 31 orang

3. Tingkat pendidikan:

- a. SD/setara : - orang
- b. SMP/setara : 1 orang
- c. SMA/setara : 9 orang
- d. D1/setara : - orang
- e. D3/D4/setara : 10 orang
- f. S1 : 47 orang
- g. S2 : 11 orang

Selain dari jumlah ASN sebagaimana tersebut di atas, dalam kegiatan operasional Dinas Pertanian juga didukung oleh tenaga non ASN sebanyak 61 orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf		Jumlah
					ASN	non ASN	
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretariat		1	3	13	11	28
3	Bidang Tanaman Pangan		1	3	2	2	8
4	Bidang Hortikultura dan Perkebunan		1	3	3	3	10
5	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		1	3	9	3	16
6	Bidang Prasarana dan Sarana		1	3	1	2	7
7	Bidang Penyuluhan		1	3	3	1	8
8	UPTD Kebun Dinas			2	1	31	34
9	Penyuluh Pertanian Lapangan (Fungsional Tertentu)				19	8	27
JUMLAH		1	6	20	51	61	139

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang (per Desember 2018)

Dilihat dari jenis kelamin, 53,85% atau 42 orang pegawai ASN Dinas Pertanian Kota Semarang adalah perempuan dan sisanya 46,15% atau 36 orang pegawai ASN laki-laki. Jumlah pegawai tersebut sebanding dengan komposisi pada jenjang eselonering dimana jabatan eselonering lebih banyak diduduki oleh perempuan daripada laki-laki. Hal ini terlihat dari 27 eselon jabatan, 19 eselon dipegang oleh perempuan dibandingkan 8 eselon yang dijabat oleh laki-laki. Sebaran pegawai ASN Dinas Pertanian Kota Semarang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan pada Tabel 2 digambarkan kondisi eselonering berdasarkan jenis kelamin.

Gambar 1. Komposisi Pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin (%)



Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang per Desember 2018 (data diolah)

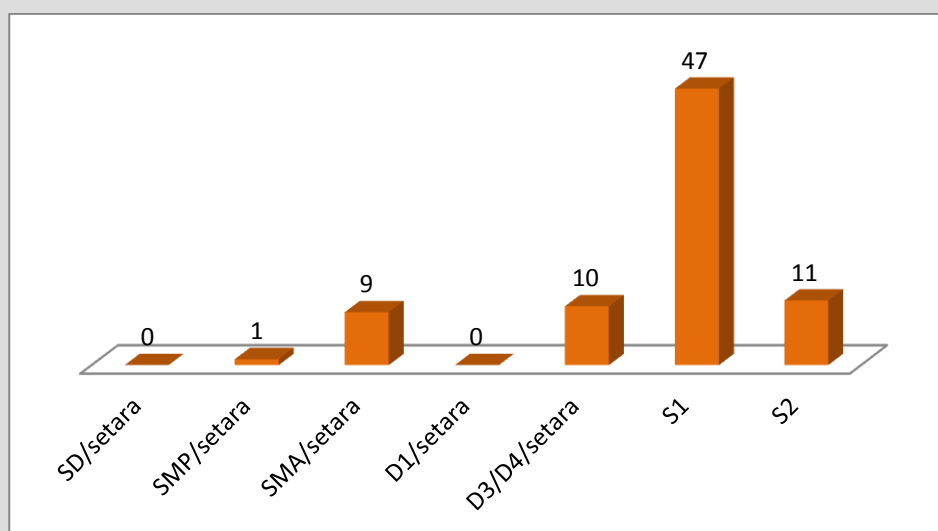
Tabel 1.2. Kondisi Eselonering Dinas Pertanian Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Eselon			Jenis Kelamin	
		Es. II	Es. III	Es. IV	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala dinas	1			-	1
2	Sekretaris		1		1	-
3	Kepala Bidang		5		2	3
4	Kepala Subbagian			3	1	2
5	Kepala Seksi			15	3	12
6	Kepala UPTD Kebun Dinas			1	1	-
7	Kepala Subbag TU UPTD Kebun Dinas			1	-	1
Jumlah		1	6	20	8	19

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang per Desember 2018 (data diolah)

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Dinas Pertanian Kota Semarang didukung oleh ASN yang berkualitas tinggi, ditunjukkan oleh 60,26% pegawai berpendidikan jenjang sarjana, 13,28% pegawai berpendidikan jenjang diploma, dan 29,2% berpendidikan jenjang SLTP/SLTA. Komposisi pegawai Dinas Pertanian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Komposisi Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)



Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang per Desember 2018 (data diolah)

4. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2018, Dinas Pertanian Kota Semarang memperoleh anggaran dari APBD Kota Semarang sebesar Rp. 20.032.056.000-. Namun, karena ada rasionalisasi anggaran, maka anggaran APBD Dinas pertanian harus dikurangi sebesar Rp 279.082.000,-, sehingga total anggaran setelah APBD Perubahan sebesar Rp 17.681.126.600,-.

5. Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Aset yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Semarang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas dan hewan-hewan ternak, sedang aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya serta tanaman yang berada di kantor dinas, klinik hewan dan UPTD Kebun Dinas yang tersebar di beberapa kecamatan. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional

organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1.3. Data Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Nama bidang barang	Jumlah barang	Satuan barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah	18	bidang	36.156.404.800	Luas total : 326.447 m ²
2	Peralatan dan mesin	783	unit	8.574.757.949	
	<i>Alat-alat besar</i>	10	unit	277.078.580	
	<i>Alat-alat angkutan</i>	52	unit	2.605.321.245	Mobil : 13 unit, Motor roda 2 : 35 unit, Motor roda 3 : 4 unit
	<i>Alat bengkel dan alat ukur</i>	7	unit	150.246.988	
	<i>Alat pertanian</i>	111	unit	1.610.830.312	
	<i>Alat kantor dan rumah tangga</i>	903	unit	2.711.517.548	
	<i>Alat studio dan alat komunikasi</i>	47	unit	180.369.171	
	<i>Alat laboratorium</i>	125	unit	1.023.384.765	
	<i>Alat-alat persenjataan/keamanan</i>	6	unit	16.009.340	
3	Gedung dan bangunan	51	unit	10.438.486.725	
	<i>Bangunan Gedung</i>	51	unit	10.290.565.725	
	<i>Monumen</i>	2	unit	147.921.000	
4	Jalan, Irigasi dan bangunan	41	unit	9.409.946.801	
	<i>Jalan dan jembatan</i>	6	unit	525.286.876	
	<i>bangunan air/irigasi</i>	48	unit	8.004.708.898	
	<i>Instalasi</i>	19	unit	762.935.027	
	<i>Jaringan</i>	9	unit	117.016.000	
5	Aset tetap lainnya	44	unit	805.660.575	
	<i>Buku dan perpustakaan</i>	4	buah	1.000.000	
	<i>Barang bercorak kebudayaan</i>	1	buah	2.480.000	
	<i>Hewan dan ternak serta tanaman</i>	40	macam	802.180.575	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	2	unit	11.577.000	
	<i>DED</i>	2	unit	11.577.000	

No	Nama bidang barang	Jumlah barang	Satuan barang	Nilai (Rp)	Keterangan
7	Aset lainnya	1	unit	92.962.000	
	Software	1	unit	92.862.000	
	Jumlah	929		65.489.795.850	

Sumber : Dinas Pertanian (data diolah per Desember 2018)

Sebagai salah satu UPTD Dinas Pertanian Kota Semarang, UPTD Kebun Dinas mengelola 13 lokasi kebun dinas yang tersebar di beberapa kecamatan. UPTD Balai Benih Pertanian berkantor di Jl. RM. Subeno Kel. Cangkiran Kec. Mijen. Komoditas yang di usahakan antara lain padi dan hortikultura. Jumlah tanaman hortikultura yang ada di kebun wilayah kerja Balai Benih Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Jumlah tanaman hortikultura yang ada di kebun wilayah kerja Balai Benih Pertanian

No	Komoditas	Jumlah Tanaman (pohon)
1	Durian	292
2	Kelengkeng	1.543
3	Jambu kristalin	1.801
4	Jambu air	138
5	Sirkaya grand anona	163
6	Sukun	10
7	Sirsat madu	847
8	Rambutan	34

Rincian lokasi, luas lahan dan komoditas yang diusahakan pada masing-masing kebun dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Table 1.5. Lokasi, luas lahan dan komoditas pada Kebun Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
1	Kebun Purwosari A Kel. Purwosari Kec. Mijen	2,5	Durian	115	2009	Masa produksi
			Kelengkeng	95	2009	Masa produksi
			Jambu kristal	100	2009	Masa produksi
			Sirsat madu	40	2009	Masa produksi
			Kelengkeng	20	2010	Masa produksi
			Jeruk	7		
2	Kebun Purwosari B Kel. Purwosari Kec. Mijen	2,5	Jambu air	138	2010	Masa produksi
			Durian	88	2010	Masa produksi
			Sukun	10	2010	Masa produksi
			Jambu kristal	90	2010	Masa produksi

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
			Petai	2	2010	Masa produksi
3	Kebun Purwosari C Kel. Purwosari Kec. Mijen	0,8	Kelengkeng	112	2012	Belum produksi Belum produksi
			Jambu Kristal	100	2012	
			Jeruk	72		
4	Kebun Bubakan Kel. Bubakan	2	Kelengkeng	150	2011	Mulai produksi
			Jambu kristalin	267	2011	Mulai produksi
	Kec. Mijen		Durian	50	2011	Awal produksi
			Sirkaya	34	2011	Mulai produksi
			Grand Anona	72	2011	Mulai produksi
5	Wates Kel. Wates Kec. Ngaliyan	5,5	Kelengkeng	355	2011	Awal produksi
			Jambu kristalin	157	2011	Awal produksi
			Sirkaya	69	2011	Awal produksi
			Jambu kristalin	300	2012	Awal produksi
			Sirsat madu	300	2012	Awal produksi
			Kelengkeng	85	2012	Awal produksi
6	Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati	1,2	Durian	32	2009	Awal produksi
			Kelengkeng	114	2009	Awal produksi
			Jambu kristal	42	2010	Awal produksi
			Sirsat madu	47	2010	Awal produksi
			Jambu kristal	210	2012	Awal produksi
			Grand Anona	28	2012	Awal produksi
7	Plalangan Kel. Plalangan Kec. Gunungpati	10				Belum ditanami tanaman produktif
8	Cepoko Kel. Cepoko Kec. Gunungpati	3,2	Kelengkeng	359	2010	Produksi
			Jambu kristal	390	2010	Produksi
			Sirsat madu	300	2010	Produksi
			Kelengkeng	65	2010	Produksi
			Durian	19	2010	Produksi
9	Nongkosawit Kel. Nongkosawit Kec. Gunungpati	1,5	Kelengkeng	119	2010	Awal produksi
			Jambu kristal	100	2010	Awal produksi
			Grand Anona	25	2010	Awal produksi
			Sirsat Madu	100	2010	Awal produksi
10	Kramas Kel. Pedalangan Kec.	2	Kelengkeng	150	2011	produksi
			Jambu kristalin	57	2011	produksi
			Sirkaya	7	2011	Awal produksi

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
	Banyumanik		Durian	10	2011	Belum produksi
			Rambutan	34	2012	Belum produksi
			Jambu kristalin	200	2012	Belum produksi
			Sirsat madu	60	2012	Belum produksi
			Kelengkeng	30	2012	Belum produksi
11	Tambangan	2,3	Indukan anggrek dendrobium	12	2011	Luas sawah : 0,8 Ha
	Kel. Tambangan		Indukan anggrek bulan	31	2011	
	Kec. Mijen		Indukan anggrek dendrobium	40	2012	
			Indukan anggrek bulan	26	2012	
			Anggrek dendrobium	1862	2011	
			Anggrek dendrobium	943	2012	
			Anggrek remaja	575		
			Jambu citra	25	2009	Sudah produksi
12	Cangkiran Kel. Cangkiran Kec. Mijen	1,2	Padi			Produksi 1 tahun 2 kali

Sumber : Dinas Pertanian (data diolah per akhir Desember 2018)

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di UPTD Kebun Dinas Pertanian maka diperlukan sarana prasarana. Sarana prasarana yang ada di UPTD Kebun Dinas antara lain:

a. Kendaraan operasional :

1. Kendaraan bermotor roda 4 : 1 unit pick up
2. Kendaraan bermotor roda 3 : 2 unit (1 unit rusak; 1 unit baik)
3. Kendaraan bermotor roda 2 : 2 unit

b. Alat dan mesin pertanian

1. Hand traktor : 2 unit
2. Traktor roda 2 : 1 unit
3. Generator : 1 unit
4. Mesin pemotong rumput : 4 unit
5. Culltivor : 1 unit

6.	APPO	: 2 unit
7.	Sprayer	: 8 unit
8.	Alat Pengering padi	: 1 unit
9.	Laminar Flow	: 2 unit
10.	Sprinkle anggrek	: 1 unit
11.	Springkle sayur	: 1 unit
12.	Mis blower	: 3 unit
13.	Blower padi	: 1 unit
14.	Pompa air	: 1 unit
15.	Pres plastic	: 1 unit
16.	Shaker	: 3 unit
17.	Greenhouse anggrek	: 3 unit
18.	Kultur jaringan	: 1 unit
19.	Autoklaf	: 2 unit

Lokasi Kantor Dinas Pertanian Kota Semarang yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pertanian Kota Semarang. Lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Semarang di Gedung Mr. Moch. Ikhsan Jl. Pemuda memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pertanian Kota Semarang.

C. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Permasalahan utama pada pembangunan pertanian Kota Semarang periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Daya saing produk pertanian sebagai produl unggulan lokal masih harus ditingkatkan.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
3. Keterbatasan lahan pertanian.
4. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pertanian.
5. Fungsi kelembagaan pertanian belum optimal.
6. Masih adanya potensi paparan zoonosa maupun penyakit hewan menular strategis lainnya

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. PK sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang 2016-2021. Berikut sistematika Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai : rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2018.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini mengemukakan akuntabilitas kinerja diutamakan

menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi (capaian kinerja organisasi, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, pemasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja SKPD serta langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi lampiran lembar pengukuran kinerja dan lampiran lain yang perlu dan terkait

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam usaha yang ditentukan untuk merealisasikan atau menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan. Solusi permasalahan tersebut direncanakan secara skala prioritas berdasarkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Walikota Semarang ditetapkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

A. Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematisa paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan salah satu wujud operasional dari visi dan misi Walikota terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016 – 2021). Rencana Strategis juga merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Pada tahun 2018, Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang mengalami perubahan kedua mengikuti hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Perubahan kedua Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor 050/3170 tanggal 7 Juni 2018 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021.

a. Visi dan Misi

Visi dan misi Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada Visi dan Misi Kota Semarang sesuai RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 –2021 ditetapkan Visi dan Misi Kota Semarang, sebagai berikut : **“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pertanian Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan dari **misi ke-4** yaitu : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang kondusif, pada **Tujuan 6** Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal yaitu pada **Sasaran 2** Meningkatnya Produk Unggulan Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu. Dalam konteks Renstra, tujuan Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan penjabaran dari misi (4) Walikota Semarang yaitu : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang kondusif, spesifik pada Tujuan 6 yaitu meningkatnya produktivitas ekonomi lokal.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, misi dan tujuan tersebut diturunkan menjadi tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu ***meningkatnya produk unggulan pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi lokal***.

Adapun sasaran pembangunan bidang pertanian yang akan dicapai selama 2016-2021 yaitu ***meningkatnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan***. Penjabaran Tujuan dan Sasaran P-Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021 disajikan melalui matrik pada table 4.1.

Tabel 2.1.
Matrik Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	REALISASI		TARGET					KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Tujuan 1: Meningkatnya produk unggulan pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi lokal	1	Jumlah wilayah produk unggulan pertanian	kawasan	-	-	2	2	3	4	4	4
Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan	1	Jumlah produksi hasil pertanian	ton	83.395	85.796	88.495	89.240	89.995	90.760	91.531	91.531
	2	Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan	kg	NA	300	1.260	2.220	3.180	4.140	5.100	5.100

c. Kebijakan dan Program

1) Kebijakan

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertanian di Kota Semarang, pada tahun 2018 terdapat tujuh arah kebijakan sesuai dengan Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang 2016-2021. Kebijakan tersebut antara lain :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Pertanian;
- b) Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pertanian;
- c) Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian;
- d) Optimalisasi teknologi pertanian dan sumberdaya pertanian;
- e) Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular strategis;
- f) Mengembangkan diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran;
- g) Penguatan kelembagaan petani;

2) Program

Program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang disusun sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam P-Renstra Dinas Pertanian dan dilaksanakan dengan anggaran APBD Kota Semarang pada tahun 2018. Program dan kegiatan tersebut antara lain :

- a) Arah kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Pertanian.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, maka disusun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan antara lain :
penyediaan jasa komunikasi, jasa sumber daya air dan listrik;
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; penyediaan alat tulis kantor;
penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; penyediaan makanan dan minuman; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah; dan belanja jasa penunjang administrasi perkantoran.

- b) Arah kebijakan : Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pertanian.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yaitu: pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan pengelolaan website.

- c) Arah kebijakan : Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian.

Dilaksanakan melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan yaitu: monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD; penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; penyusunan pelaporan keuangan semesteran; penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, penyusunan LAKIP; penyusunan LKPJ SKPD; penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan bendahara pembantu; dan penyusunan program kerja SKPD.

- d) Arah kebijakan : Optimalisasi teknologi pertanian dan sumberdaya pertanian, dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan yaitu : validasi data produksi pertanian, optimalisasi pekarangan, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); pengembangan pasca panen produksi pertanian; peningkatan intensifikasi pertanian, dan optimalisasi kebun dinas untuk pengembangan pertanian;
2. Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan yaitu: peningkatan populasi ternak, peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan, dan pemeriksaan bahan asal hewan (BAH).

- e) Arah kebijakan : Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular startegis, dilaksanakan melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dengan kegiatan yaitu: pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.

- f) Arah kebijakan : Mengembangkan diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran. Program yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut antara lain :
1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dengan kegiatan yaitu : promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah.
 2. Program peningkatan usaha peternakan dan kesejahteraan petani peternak, dengan kegiatan yaitu : penyusunan database peternakan dan informasi harga komoditas peternakan; dan fasilitasi pemasaran produk peternakan.
- g) Arah kebijakan : Penguatan kelembagaan petani
- Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan melalui program, yaitu program pengembangan SDM Pertanian dengan kegiatan yaitu: kegiatan pembinaan dan pendampingan petani; peningkatan SDM petani; Peningkatan SDM penyuluh; dan pengembangan sarana penyuluhan.

B. Indikator Kinerja Utama Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari

pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sesuai dengan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2016 - 2021, penetapan capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018 berdasarkan sasaran strategis ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2. Penetapan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sesuai P-Renstra

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2018
1.	Tujuan: Meningkatnya produk unggulan pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi lokal	1.	Jumlah wilayah produk unggulan pertanian	2 kawasan
	Sasaran: Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan yang berkelanjutan	1.	Jumlah produksi hasil pertanian	89.240 ton
		2.	Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan	2.220 kg

Selanjutnya, berdasarkan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2018 tingkat OPD antara Walikota Semarang dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, indikator kinerja utama (IKU) pada Tabel 2 tersebut dijabarkan dalam indikator program kerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 2.3. Indikator Program Kerja Tahun 2018

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparatur yang dipenuhi	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja & keuangan	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
4.	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran	43 kelompok
5.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1. Sentra produk unggulan 1. Jumlah kawasan pertanian perkotaan 2. Jumlah produksi pertanian 3. Jumlah produksi tanaman pangan 4. Jumlah produksi tanaman perkebunan 5. Jumlah produksi tanaman hortikultura 6. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan 7. Luas tanaman pangan organik	2 kawasan 37 kelurahan 55.642 ha 44.604 ton 260 ton 10.778 ton 1.626 ha 5 ha
6.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus penyakit hewan menular	32 kasus
7.	Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	33.597,67 ton
		Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)	9 sertifikat
8.	Pengembangan SDM Pertanian	1. Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi 2. Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	16 kelompok 957 orang
9.	Peningkatan Usaha Peternakan & Kesejahteraan petani peternak	Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi	2 kelompok

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil program utama dengan targetnya indikator yang diwakili masing-masing sasaran di dalamnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan yang dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Laporan kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016–2021. Indikator kinerja tujuan mencerminkan *benefit/impact* sedangkan sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk

pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, untuk memudahkan mendapatkan gambaran umum capaian kinerja tujuan dan sasaran secara keseluruhan dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala ordinal pengukuran kinerja

No	Rentang capaian	Kategori capaian
1.	Capaian $\geq 100\%$	Memuaskan
2.	$85\% \leq \text{capaian} < 100\%$	Sangat Baik
3.	$70\% \leq \text{capaian} < 85\%$	Baik
4.	$55\% \leq \text{capaian} < 70\%$	Cukup
5.	Capaian $< 55\%$	Kurang

Untuk menyimpulkan keberhasilan kinerja Tujuan dan Sasaran dilakukan dengan merata-ratakan setiap capaian indikator kinerja masing-masing.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang selama tahun berjalan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target), serta menguraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Capaian kinerja rata-rata keseluruhan berdasarkan Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang dan target kinerja untuk tahun 2018 adalah sebesar 99,54% atau kategori sangat baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah wilayah produk unggulan pertanian (kawasan)	2	2	100	Memuaskan	2
2.	Jumlah produksi hasil pertanian (ton)	89.240	84.710,92	94,93	Sangat baik	88.820
3.	Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan (kg)	2.220	2.312	104,14	Memuaskan	1.365

Tabel 3.3. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2017	
				TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan yang berkelanjutan	1.	Jumlah produksi hasil pertanian (ton)	89.240	89.240	84.710,92	94,93	88.820
		2.	Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan (kg)	2.220	2.220	2.312	104,14	1.365

Pada Tabel 3.2 dan 3.3 dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada tahun 2018 yaitu indikator kinerja **tujuan** yaitu jumlah wilayah produk unggulan pertanian tercapai dengan memuaskan dimana dari target 2 kawasan dapat terealisasi 100%. Dua kawasan produk unggulan pertanian yang berhasil diwujudkan yaitu Agro Cepoko di Kecamatan Gunungpati dan Agro Purwosari di Kecamatan Mijen. Adapun indikator kinerja **jumlah produksi hasil pertanian** tidak dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan atau hanya terealisasi sebesar 94,93% dengan skor sangat baik. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, maka indikator kinerja ini mengalami penurunan sebesar 4,63%. Sedangkan pada indikator kinerja **jumlah produksi hasil pertanian perkotaan**, dari target tahun 2018 sebesar 2.220 kg dapat terealisasi 2.312 kg atau tercapai sebesar 104,14% dengan skor memuaskan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, maka indikator kinerja jumlah produksi hasil pertanian perkotaan meningkat sebesar 69,38%.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian tersebut sangat baik berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian pada tahun 2018. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi; (2) Mengembangkan diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran; (3) Optimalisasi teknologi pertanian dan sumber daya pertanian; (4) Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular strategis; (5) Penguatan kelembagaan petani; (6) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Pertanian; (7) Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pertanian; (8) Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian.

Secara khusus, pencapaian realisasi kinerja sasaran pembangunan sektor pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak tercapainya target indikator kinerja produksi hasil pertanian.

Realisasi pencapaian indikator kinerja jumlah produksi hasil pertanian Kota Semarang pada tahun 2018 adalah sebesar 84.710,92 ton (94,93 %) dan terealisasi kurang dari jumlah target yang telah ditetapkan di dalam renstra untuk tahun 2018 yaitu 89.240 ton. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan produksi dari sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan yang

tidak dapat mencapai target bahkan menurun dibandingkan produksi pada tahun 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena (1) berkurangnya luas lahan baik untuk pertanian tanaman pangan maupun perkebunan karena alih fungsi lahan; (2) musim kering yang panjang (Maret sampai awal Desember) sehingga sebagian besar areal persawahan tidak mendapat pengairan yang cukup; (3) serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang massif terutama pada komoditas kelapa di daerah sentra produksi yaitu Kecamatan Pedurungan dan Genuk. Di sisi lain upaya untuk mengatasi kekurangan air sudah dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian tetapi belum optimal karena anggaran yang tersedia (baik melalui APBD Kota maupun DAK (APBN)) belum bisa mencakup seluruh areal yang terdampak kekeringan.

- b. Pencapaian indikator kinerja jumlah produksi hasil pertanian perkotaan dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

Dari target renstra tahun 2018 sebesar 2.220 kg, pencapaian indikator kinerja jumlah produksi hasil pertanian perkotaan sampai dengan akhir tahun 2018 dapat terealisasi 104,14% sebesar 2.312 kg, melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan budidaya pertanian di wilayah-wilayah perkotaan antara lain berupa bantuan bibit sayuran dan toga, bantuan paket hidroponik dan pelatihan budidaya pertanian perkotaan.

Pada tahun 2018, Dinas Pertanian Kota Semarang telah memberikan bantuan paket hidroponik yang diberikan kepada 16 kelompok tani pada 16 kecamatan di Kota Semarang, sehingga total dari tahun 2016 sampai sekarang pertanian perkotaan berkembang di 37 kelurahan di Kota Semarang. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertanian perkotaan, Dinas Pertanian selain memberikan paket hidroponik juga memberikan pembekalan kelompok tani penerima paket berupa pelatihan budidaya pertanian perkotaan.

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2018, Dinas Pertanian Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Dinas Pertanian Tahun 2018,

capaian tujuan diuraikan dalam capaian sasaran dan dilaksanakan melalui arah kebijakan, yaitu :

Tujuan : Meningkatnya produk unggulan pertanian untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi lokal

Pengelolaan sistem pertanian yang menggunakan teknologi tepat guna, selaras dan seimbang dengan lingkungan akan menjamin peningkatan produktivitas lahan dan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan. Indikator kinerja dari tujuan yang hendak dicapai adalah jumlah wilayah produk unggulan pertanian di Kota Semarang. Untuk mewujudkan terlaksananya tujuan tersebut, sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu: **Meningkatnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan.**

Sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 indikator kinerja, yaitu jumlah produksi hasil pertanian dan jumlah produksi hasil pertanian perkotaan. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, dibutuhkan lima strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pertanian.

Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pertanian merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian dalam usaha pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bidang pertanian di Kota Semarang. Sebagai aparatur negara, aparat dinas pertanian merupakan fasilitator dan penyambung program-program pertanian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu agar pembangunan pertanian dapat berhasil dalam pelaksanaannya, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas kinerja aparat

Strategi tersebut diuraikan dalam 3 arah kebijakan yaitu peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Pertanian, peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pertanian dan peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan. Dari tiap-tiap arah kebijakan tersebut dijabarkan lagi dalam program yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Pertanian

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian kinerja pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100	Memuaskan	100

Indikator kinerja pada program pelayanan administrasi perkantoran berupa cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat direalisasikan 100% dari target yang ditentukan dengan skor memuaskan. Hal yang menyebabkan tercapainya realisasi kinerja adalah dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program sesuai dengan target yang ditetapkan antara lain kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; penyediaan makanan dan minuman; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; dan belanja jasa penunjang administrasi perkantoran.

b. Kebijakan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pertanian

Program yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1		2	3	4	5	6	7
1.	peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	100	Memuaskan	100

Tercapainya realisasi program sesuai dengan target yang ditentukan disebabkan karena semua kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional; pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional; pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; dan pengelolaan website.

c. Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Dan Keuangan

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program peningkatan pengembangan laporan capaian kinerja, dengan pencapaian realisasi indikator kinerja mencapai 100% sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Laporan Capaian Kinerja

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan pengembangan laporan capaian kinerja	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100 %	100	Memuaskan	100

Target pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018 dapat terealisasi karena kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

penyusunan pelaporan keuangan semesteran; penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; monitoring, evaluasi dan pelaporan; penyusunan LKJIP; penyusunan renstra SKPD; penyusunan LKPJ SKPD; penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu; dan penyusunan Renja (Rencana Kerja).

2. Meningkatkan nilai tambah produk-produk hasil pertanian

Fasilitasi pemasaran baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional untuk produk-produk hasil pertanian Kota Semarang sangat diperlukan untuk mewujudkan tumbuhnya usaha pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Untuk menjalankan strategi tersebut, disusun arah kebijakan yaitu : mengembangkan diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran dengan program-program pendukung dan pencapaian kerjanya antara lain :

Tabel 3.7. Capaian kinerja program pada arah kebijakan mengembangkan diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian (kelompok)	43	43	100	Memuaskan	38
2.	Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak	Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi (kelp)	2	2	100	Memuaskan	2

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian kinerja tahun 2018 pada program promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dapat terealisasi 100 % dengan skor memuaskan, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 pencapaian kinerja program tahun 2018 meningkat 13%. Terealisasinya pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena kegiatan yang mendukung program tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik, yaitu Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

Pada program peningkatan usaha peternakan dan kesejahteraan petani peternak, realisasi kinerjanya pada tahun 2018 dapat tercapai sesuai target yaitu 2 kelompok tani ternak atau tercapai 100%. Dengan demikian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah 6 kelompok tani ternak yang difasilitasi pemasarannya. Dukungan berupa keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang program turut membantu tercapainya kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : penyusunan database peternakan dan informasi harga komoditas peternakan dan fasilitasi pemasaran produk peternakan.

3. *Menguatkan manajemen budidaya*

Pengelolaan lahan untuk pertanian terutama pada lahan yang terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu dilakukan dengan penguatan manajemen budidaya berupa optimalisasi teknologi pertanian dan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan, khususnya kepada petani. Pada strategi penguatan manajemen budidaya, arah kebijakan yang diperlukan adalah optimalisasi teknologi pertanian dan sumberdaya pertanian yang didukung oleh dua program kerja, yaitu (1) program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; dan (2) Program peningkatan produksi hasil peternakan. Pencapaian kinerja masing-masing program tersebut diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Capaian kinerja program pada kebijakan optimalisasi teknologi dan sumberdaya pertanian

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah produksi pertanian (ton)	55.642	51.008,63	91,67	Sangat baik	55.493,91
		Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	44.604	39.903,4	89,46	Sangat baik	44.537,34
		Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	10.778	10.854	100,71	Memuaskan	10.695,57

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
		Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)	260	251,23	96,63	Sangat Baik	261
		Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Ha)	1.626,16	2.251,41	138,45	Memuaskan	2.251,41
		Luas tanaman pangan organik (ha)	5	10	200,00	Memuaskan	4
		Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	37	37	100,00	Memuaskan	21
		Sentra produk unggulan pertanian (kawasan)	2	2	100,00	Memuaskan	2
2.	Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (ton)	33.597,67	33.702	100,31	Memuaskan	33.325,60
		Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV) (sertifikat)	9	9	100	Memuaskan	7

(1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Secara umum pencapaian kinerja program peningkatan produksi pertanian/perkebunan melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk tahun 2018 yaitu rata-rata capaian 114,62% dengan kategori skor memuaskan. Pencapaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator yang berhasil dicapai adalah:
 - i. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tercapai lebih dari yang ditargetkan 1.626,16 ha menjadi 2.251,41 ha atau berhasil mencapai target 135,48%.
 - ii. Luas pertanaman pangan organik berhasil meningkat dari yang ditargetkan 5 ha menjadi 10 ha atau berhasil mencapai target 200%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 250%.

- iii. Jumlah kawasan pertanian perkotaan tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu 37 kelurahan atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 76,19%.
- iv. Sentra produk unggulan pertanian (kawasan) tercapai sesuai yang ditargetkan yaitu 2 kawasan atau berhasil mencapai target 100%.
- v. Produksi tanaman hortikultura meningkat dari yang ditargetkan 10.778 ton menjadi 10.854 ton atau berhasil mencapai target 100,7%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 1,48%.

Indikator-indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, (2) Validasi data produksi pertanian, (3) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), (4) Pengembangan pasca panen produksi pertanian, (5) Optimalisasi pekarangan, (6) Peningkatan intensifikasi Pertanian, dan (7) Optimalisasi kebun dinas untuk pengembangan pertanian,

- b. Indikator yang belum berhasil dicapai yaitu produksi pertanian dari yang ditargetkan 55.642 ton menjadi yaitu 51.008,63 ton atau mencapai target 91,67%. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 8,08%. Produksi pertanian yang turun ini terdiri dari :
 - i. Produksi tanaman pangan turun dari yang ditargetkan 44.604 ton menjadi 39.903,40 ton atau mencapai target 89,46%. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 10,4%.
 - ii. Produksi tanaman perkebunan turun dari yang ditargetkan yaitu 251,23 ton atau mencapai target 96,62%. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,74%.

Indikator-indikator kinerja tersebut gagal dicapai antara lain disebabkan oleh: (1) berkurangnya luas lahan baik untuk pertanian tanaman pangan maupun perkebunan karena alih fungsi lahan; (2)

musim kering yang panjang (Maret sampai awal Desember) sehingga sebagian besar areal persawahan tidak mendapat pengairan yang cukup; (3) serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang massif terutama pada komoditas kelapa di daerah sentra produksi yaitu Kecamatan Pedurungan dan Genuk. Upaya untuk mengatasi kekurangan air sudah dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian tetapi belum optimal karena anggaran yang tersedia (baik melalui APBD Kota maupun DAK (APBN)) belum bisa mencakup seluruh areal yang terdampak kekeringan.

(2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan ditujukan untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya peternakan di wilayah Kota Semarang sehingga dapat diperoleh hasil peternakan sesuai target dan mampu memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani ternak. Selain dari itu, Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan dalam menjamin ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) yang ditujukan untuk melindungi konsumen dari bahaya cemaran mikroba dan atau residu sekaligus serta untuk meningkatkan daya saing produk peternakan. Terdapat dua indikator untuk mengukur kinerja program peningkatan produksi hasil peternakan, yaitu :

a. Produksi Hasil Peternakan

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan produksi hasil peternakan dari yang ditargetkan 33.597,67 ton menjadi 33.702,67 ton, atau berhasil mencapai target 100,31%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 1,13%.

b. Sertifikat Dan Rekomendasi Penjaminan ASUH (NKV)

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV) dari yang ditargetkan 9 sertifikat, tercapai 9 sertifikat atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 12,57%.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) peningkatan populasi ternak, (2)

peningkatan sarana & prasarana produksi peternakan, dan (3) pemeriksaan bahan asal hewan (BAH).

4. Meningkatkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Kebijakan yang disusun untuk menunjang strategi tersebut adalah meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular strategis. Adapun program yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah program pencegahan penanggulangan penyakit ternak dengan target kinerja pada tahun 2018 adalah 32 kasus penyakit hewan menular.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Pada Kebijakan Meningkatkan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Penyakit Hewan Menular Strategis

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Pencegahan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kasus penyakit hewan menular	32	30	107,00	Memuaskan	36

Berdasarkan Tabel tersebut pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kota Semarang dari yang ditargetkan 32 kasus menjadi hanya 30 kasus yang ditemukan, atau berhasil mencapai target 107%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 36 kasus atau menurun 17%. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang program, yaitu pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular melalui biosecurity, vaksinasi, dan surveillance.

5. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian

Pembangunan bidang pertanian adalah melakukan pembangunan masyarakat (*community development*) bukan hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan tetapi lebih luas lagi yaitu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia individu dan masyarakat sehingga mampu

meningkatkan produktivitas usaha pertanian dengan menggunakan sumberdaya internal dan eksternal.

Strategi berikutnya yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian di bidang pengembangan SDM yaitu meningkatkan kapasitas SDM pertanian. Untuk melaksanakan strategi tersebut, diperlukan arah kebijakan yaitu penguatan kelembagaan petani. Kebijakan tersebut dituangkan dalam program Pengembangan SDM Pertanian, dengan indikator kinerja program diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.10. Capaian kinerja program pada kebijakan penguatan kelembagaan petani

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018				REALISASI TAHUN 2017
			TARGET	REALISASI	%	SKOR	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan SDM Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi (kelp)	16	18	112,50	Memuaskan	14
		Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	957	976	102,51	Memuaskan	776

Capaian kinerja yang dapat direalisasikan adalah Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi (madya dan utama) dari yang ditargetkan 16 kelompok tani, tercapai target sebanyak 18 kelompok tani, atau berhasil mencapai target 112,5%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 28,57%.

Pada indikator yang lain, kinerja yang dicapai adalah jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya dari yang ditargetkan 776 orang menjadi 976 orang, atau berhasil mencapai target 101,98%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 25,77%.

Indikator-indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu: (1) pembinaan dan pendampingan petani, (2) peningkatan SDM petani, (3) peningkatan SDM penyuluh, dan (4) pengembangan sarana penyuluhan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2018 adalah 114,02 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 127,8%, maka capaian tersebut mengalami penurunan, meskipun dalam jumlah absolut realisasinya mengalami kenaikan. Realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 1.561.597.171,- sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.342.848.130,-. Tahun 2018 target PAD pada anggaran murni sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan kemudian meningkat pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.369.634.797,-.

Rincian target dan realisasi pendapatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

v

Tabel 3.11. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	% Realisasi Thd Target
1	Penjualan hasil pertanian	118.500.000	142.620.600	24.120.600	120,35
2	Penjualan Hasil peternakan	1.251.134.797	1.418.976.571	167.841.774	113,42
Tahun 2018		1.369.634.797	1.561.597.171	191.962.374	114,02
1	Penjualan hasil pertanian	106.000.000	101.020.130	-4.979.870	95,30
2	Penjualan Hasil peternakan	944.754.064	1.241.828.000	297.073.936	131,44
Tahun 2017		1.050.754.064	1.342.848.130	292.094.066	127,80
Selisih Tahun 2017 dan 2016		318.880.733	218.749.041	-100.131.692	

Pada tahun 2018 realisasi pendapatan mencapai Rp 1.561.597.171,-. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.342.848.130,- atau naik sebesar Rp 218.749.041,- (16,29%). Namun bila dibandingkan antara realisasi dan target pendapatan, maka realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami

penurunan dibanding tahun 2017, dimana pendapatan tahun 2018 terealisasi sebesar 114,2 %, sedangkan pada tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 127,8 %.

- a. Pendapatan dari penjualan hasil pertanian (padi, tanaman sayuran, buah, florikultur) menurun

Pada tahun 2018 target pendapatan penjualan hasil pertanian sebanyak Rp.118.500.000,- sedangkan realisasinya mencapai Rp. 142.620.600,- atau lebih 20,35% (Rp 24.120.600,-) dari yang ditargetkan. Pada tahun 2017 target pendapatan penjualan hasil pertanian sebanyak Rp 106.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp 101.020.130,-, atau kurang 4,7% (Rp 4.979.870,-) dari yang ditargetkan.

Berdasarkan perhitungan, ada peningkatan realisasi pendapatan dari penjualan hasil pertanian pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 41.600.470,- atau 41,18%. Peningkatan pendapatan dari penjualan hasil pertanian terjadi karena jumlah produksi pertanian yang dihasilkan oleh kebun-kebun Dinas Pertanian tahun 2018 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2017 sehingga lebih banyak produk yang dapat dijual.

Untuk meningkatkan realisasi pendapatan dari penjualan hasil pertanian pada tahun selanjutnya maka pemeliharaan tanaman, baik tanaman pangan maupun hortikultura dan florikultura harus lebih intensif dengan memperhatikan gejala anomali cuaca sehingga jumlah dan kualitas produksinya dapat meningkat secara optimal. Dengan demikian karena jumlah dan kualitas produksi yang lebih baik, maka akan diperoleh harga akan yang lebih tinggi daripada produk dengan kualitas biasa.

- b. Realisasi Pendapatan terhadap target penjualan hasil peternakan menurun

Pada tahun 2018 target pendapatan dari penjualan hasil peternakan sebesar Rp 1.251.134.797,- dapat realisasi sebesar Rp 1.418.976.571,- atau terealisasi 113,42 % dengan selisih sebanyak Rp 167.841.774,-. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi pendapatan dari penjualan hasil peternakan sebesar Rp 1.241.828.000,- atau

terrealisasi 131,44 % dari target sebesar Rp 944.754.064,- dengan selisih sebesar Rp 297.073.936,-.

Berdasarkan perhitungan tersebut, selisih realisasi pendapatan terhadap target hasil penjualan hasil peternakan pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 129.232.162,-. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan peraturan tentang penghitungan bagi hasil ternak gaduhan. Berdasarkan Perwal No. 69 tahun 2017 tentang Perubahan Perwal No.11 tahun 2007 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah di Kota Semarang, bagi hasil penjualan ternak gaduhan dihitung berdasarkan harga satuan ekor ternak yang dijual, sedangkan pada Perwal sebelumnya bagi hasil ternak dihitung berdasarkan pada jumlah berat badan ternak tersebut. Hal ini cukup berpengaruh terhadap nilai pendapatan yang diterima baik oleh peternak gaduh maupun bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu serta fluktuasi harga yang tidak stabil pada saat penjualan hasil peternakan juga turut mempengaruhi jumlah pendapatan dari penjualan ternak gaduhan.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2018

Pada tahun 2018, Dinas Pertanian Kota Semarang memperoleh anggaran sebesar Rp 29.003.092.600,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.321.966.000,-
- b. Belanja Langsung : Rp. 17.681.126.600,-

Dalam realisasinya, anggaran tahun 2018 yang dapat diserap sebesar Rp 28.208.076.044,- atau 97,26 % sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 795.016.556,- atau 2,74 % dari pagu anggaran. Apabila dirinci dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp 10.626.258.879,- atau 93,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp 11.321.966.000,- sehingga dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi Rp 695.707.121,- (6,74%). Sedangkan untuk belanja langsung, dari pagu anggaran Rp. 17.681.126.600,-, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 17.581.817.165,- atau 99,44%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 99.309.435,- (0,56%).

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017, Dinas Pertanian Kota Semarang memperoleh anggaran sebesar Rp 24.015.225.000,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp.9.755.389.000,-
- b. Belanja Langsung : Rp.14.259.836.000,-

Dalam realisasinya, anggaran tahun 2017 yang dapat diserap sebesar Rp 23.074.143.145,- atau 96,08 % sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 941.081.855,- atau 3,92 %. Apabila dirinci dari jenis anggaran, maka dari pagu anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 9.755.389.000,- realisasi mencapai Rp 9.084.562.892,- atau 93,12%, sehingga terdapat efisiensi Rp 670.826.108,-. Sedangkan untuk belanja langsung, dari pagu anggaran Rp. 14.259.836.000,-, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 13.989.580.253,- atau 98,1%, sehingga ada efisiensi Rp 270.255.747,- (1,9%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2018 dan 2017

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	% Realiasi thd Pagu
1	Belanja Tidak Langsung	11.321.966.000	10.626.258.879	695.707.121	93,86
2	Belanja Langsung	17.681.126.600	17.581.817.165	99.309.435	99,44
Tahun 2018		29.003.092.600	28.208.076.044	795.016.556	97,26
1	Belanja Tidak Langsung	9.755.389.000	9.084.562.892	670.826.108	93,12
2	Belanja Langsung	14.259.836.000	13.989.580.253	270.255.747	98,10
Tahun 2017		24.015.225.000	23.074.143.145	941.081.855	96,08

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2017, yaitu 97,26 % pada tahun 2018 dibandingkan 96,08 % pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang mengalami peningkatan.

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Berdasarkan penghitungan anggaran dan realisasi belanja selama tahun 2018, maka diperoleh sisa lebih dari anggaran yang terserap sebanyak Rp 795.016.556,- atau 2,74 %. Sisa lebih penghitungan anggaran tersebut sebagian besar berasal dari efisiensi pengadaan barang dan jasa dengan tidak mengurangi kualitas, kuantitas, kinerja dan pencapaian sasaran.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja dari salah satu periode renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sehingga di dalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja tujuan selama masa periode renstra serta capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang diukur dengan menghitung rata-rata seluruh pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diwakili oleh masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan Perubahan Penetapan Kinerja tahun 2018. Pengukuran keberhasilan sasaran strategis lebih dititikberatkan pada indikator *outcome* (hasil). Adapun capaian kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan Dinas Pertanian Kota Semarang, yaitu jumlah wilayah produk unggulan pertanian, pada tahun 2018 adalah 100% dengan kategori memuaskan.
2. Rata-rata capaian kinerja dari sasaran strategis adalah sebesar 99,54 % dengan kategori sangat baik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah produksi hasil pertanian dengan capain kinerja 94,93 %
 - b. Jumlah produksi hasil pertanian perkotaan dengan capain kinerja 104,14%
3. Pendapatan tahun 2018 terealisasi 114,02 % atau sebesar Rp 1.561.597.171,- dari target sebanyak Rp 1.369.634.797,-.

4. Dalam realisasinya, anggaran tahun 2018 yang dapat diserap sebesar Rp 28.208.076.044,- atau 96.08 % sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp 795.016.556,- atau 2,74 % dari target anggaran sebesar Rp 29.003.092.600,-

Demikian, semoga Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Dinas Pertanian Kota Semarang untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *good governance*.